



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDY BUDI SUSILO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 90342

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.196.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 718 m2/143 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/120 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 74 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 111.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 292.500.000
5. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 292.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **539.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VENTURER 2.0 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **496.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **642.523.079**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 526.500.000

Sub Total

Rp. 6.400.023.079

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.400.023.079

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.